

THE EMPOWERMENT OF FURNITURE CRAFTSMEN IN TRANGSAN VILLAGE GATAK SUB-DISTRICT SUKOHARJO REGENCY

Bambang Mursito¹, Totok Mardikanto², Sigit Santoso², Darsono²

¹Univeritas Islam Batik Surakarta

²Universitas Sebelas Maret Surakarta

ABSTRAK

The objectives of this research are to reveal the conditions of furniture craftsmen, to identify the activity coverage, the benefit recipients, and empowerment system of furniture craftsmen, to analyze the strengths and weaknesses of the implemented empowerment, and to formulate a model of empowerment of craftsmen in the future.

This research used the descriptive approach. It was conducted at Trangsan village, Gatak Sub-district, Sukoharjo regency. This village was chosen as the research location for it is a center for furniture industry craftsmen with several levels of craftsmen. As a center for furniture industry craftsmen, it drew an adequately large attention of various parties conducting the empowerment. The samples of the research were taken by using the snowball sampling technique. The data of the research were gathered from the craftsmen, statistical data, reports, village data, and informants. They were then analyzed by using the interactive technique of analysis.

The results of the research show that the furniture craft industry at Trangsan village bears weaknesses in terms of new design creation, lack of capital, and dependence on order of large companies. Yet, the craftsmen in the village also have some strengths such as their long industrial experiences in the field and the adequate number of craftsmen. They also have more opportunities due to the sprouting up of housing and office constructions in the country and overseas. However, there are also some threats arising from the substitute products or goods such as synthetic rattans from the competitors of other countries in addition to the high price and scarcity of rattan materials. Based on the strengths, weaknesses, opportunities, and threats, the furniture craft industry in Trangsan has a big potential of being developed. To achieve this, it is necessary to conduct a craftsman empowerment through four patterns of development, namely: human resource development, business development, environmental development, institutional development. The four developments shall be done simultaneously and integratedly so that the impacts of the empowerment are progressively measurable. The excellence of the empowerment conducted by many parties is able to extend significant perspectives to the furniture craft industry in Trangsan village, to make the center for furniture craft industry in the village famous in international markets. Yet, there are still various weaknesses. The root of the weaknesses is the partial empowerment or the policies which are not systemic. Therefore, so as to develop an empowerment system which is in compliance with the characters of the furniture craft industry in the village, all of the elements of stakeholders shall be involved. This model is called synergy-based pro-industrial empowerment because it synergizes all of the prevailing elements for conducting empowerment. The final goal of this empowerment is the creation of independent craftsmen

Keywords: *craftsmen, empowerment, and synergy*

Pendahuluan

Desa Trangsan, merupakan sentra industri mebel yang terletak sekitar 10-15 kilo meter sebelah barat laut dari Kota Sukoharjo. Keberadaan Desa Trangsan penting karena banyak berperan dalam penyerapan tenaga kerja baik dari Trangsan sendiri maupun dari wilayah sekitarnya, dan sebagai sentra mebel sudah dikenal di pasar mebel internasional.

Selama ini Trangsan dikenal sebagai sentra mebel dengan menggunakan bahan baku rotan. Namun karena kelangkaan bahan baku rotan membuat harga bahan baku tersebut mengalami peningkatan yang sangat tinggi, sehingga banyak pengusaha yang menggantinya dengan bahan baku selain rotan. Penggantian bahan baku ini dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup, dan di sisi lain hal ini menunjukkan kreativitas para pengusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.

Pada tahun 2007-2008 usaha mebel merupakan salah satu usaha potensial di wilayah Surakarta. Industri mebel di wilayah ini melibatkan 216 eksportir serta menyerap tenaga kerja sebesar kurang lebih 44.000 orang. Dengan output kurang lebih 690 kontainer 40 FT/bulan, industri ini mencatat nilai ekspor sebesar Rp. 841,23 miliar. Sementara sub-sektor mebel rotan, yang mayoritas produsennya berada di klaster mebel rotan Desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, merupakan salah satu komoditas ekspor utama bagi Kabupaten Sukoharjo setelah tekstil dan produk tekstil.

Saat ini perusahaan mebel dan kerajinan yang aktif di Desa Trangsan sebanyak 450 unit usaha yang memproduksi berbagai jenis mebel, seperti kursi, meja, lemari, sketsel, perabotan rumah, dan sebagainya. Yang termasuk ke dalam kategori skala menengah atas sebanyak 15 unit usaha, menengah 20 unit usaha, sedangkan selebihnya adalah dalam skala kecil dan mikro. Sentra industri ini mengekspor mebel dan kerajinan sekitar 120 kontainer per bulan, terutama ke negara-negara Eropa, seperti Spanyol, Belanda dan Inggris, di samping ke Amerika Serikat, Australia dan ke beberapa negara Asia.

Industri kecil mebel di Desa Trangsan menarik untuk dikaji dalam kaitannya dengan kemampuannya untuk bertahan dalam masa krisis, merupakan alternatif pencipta lapangan kerja di luar sektor pertanian, memperbesar Pendapatan Asli Daerah, maupun kaitannya dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam pemerataan hasil pembangunan.

Perhatian dan keperpihakan kebijakan terhadap industri kecil, termasuk para pengrajin mebel skala rumah tangga penting dilakukan, mengingat peranannya yang begitu besar, baik dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan pelaku usaha, bahkan sampai pada kemampuannya menghasilkan devisa, sehingga bagaimana memberdayakan pengrajin mebel di Trangsan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo ini perlu untuk diteliti.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kondisi pengrajin mebel dan komunitas pengrajin di Desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Bagaimana lingkup kegiatan, penerima manfaat, dan sistem pemberdayaan pengrajin mebel. Bagaimana keunggulan dan kelemahan pemberdayaan terhadap pengrajin mebel yang telah dilaksanakan. Bagaimana model pemberdayaan pengrajin mebel di masa yang akan datang.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengungkapkan kondisi pengrajin mebel di Desa Trangsan.
2. Mengetahui lingkup kegiatan, penerima manfaat, dan sistem pemberdayaan pengrajin mebel.
3. Menganalisis keunggulan dan kelemahan pemberdayaan terhadap pengrajin mebel yang telah dilaksanakan.
4. Merumuskan model pemberdayaan pengrajin mebel di masa yang akan datang.

Tinjauan Pustaka

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat ialah: 1) upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu, 2) upaya untuk memberi daya atau kekuatan kepada masyarakat, dan 3) upaya membangun sumber daya manusia dengan mendorong, memberi motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya (Sumodiningrat, 1997).

Pendekatan Pemberdayaan

Beberapa kajian dalam pemberdayaan, seperti, Soetomo, (2010); Long, (1977); memaparkan beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk pemberdayaan. Secara garis besar pendekatan pemberdayaan itu dapat digolongkan ke dalam dua karakteristik pendekatan, yaitu *improvement approach* dan *transformation approach*.

Pendekatan *improvement approach* dilakukan dengan menekankan pada perubahan perilaku melalui perbaikan-perbaikan elemen-elemen atau kegiatan-kegiatan secara parsial tanpa mengubah struktur sistem. Cara kerjanya bisa dianalogikan dengan tambal sulam.

Transformation approach, pendekatan itu ditandai dengan melakukan perombakan struktur yang lama dengan struktur yang baru, karena dengan struktur lama itu tujuan tidak segera tercapai. Pendekatan dengan cara ini dapat dikatakan sangat radikal, hanya saja bisa menjadi cara yang efektif untuk segera mengurai akar masalah. Pendekatan ini diidentifikasi oleh Hardiman dan

Migley sebagai langkah yang tepat untuk melakukan pemberdayaan yang mengharuskan adanya pemerataan, atau perlu adanya distribusi sumber daya.

Orientasi Pemberdayaan

Secara garis besar orientasi pemberdayaan ada yang berorientasi hasil, dan ada yang berorientasi proses. Orientasi pemberdayaan yang pertama tekanannya pada hasil. Orientasi ini dilakukan dengan technical assistance/pendampingan. Model *technical assistance* ini menekankan penampakan hasil dengan cepat, maka pengendalian juga harus ketat. Pola *technical assistance* ini dipandang kurang mendidik, karena manusia menjadi cenderung tergantung pada alur di luar dirinya. *Manusianya menjadi mekanistik dan kurang mampu mengembangkan daya kemampuannya.*

Orientasi pemberdayaan yang kedua yaitu orientasi proses, dimana pemberdayaan ditekankan pada pengembangan kemampuan diri untuk mampu mengatasi problematikanya sendiri. Program ini disebut sebagai *self help*, yang menekankan pada kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhannya, menentukan apa yang harus diperbuat untuk mengatasi kebutuhan itu, serta memilih keputusan apa yang harus diambil untuk memenuhi kebutuhan. Comb dan Ahmed (1980), menyebut program *self-help* ini dengan istilah *enabling process*.

Klasifikasi Pengrajin

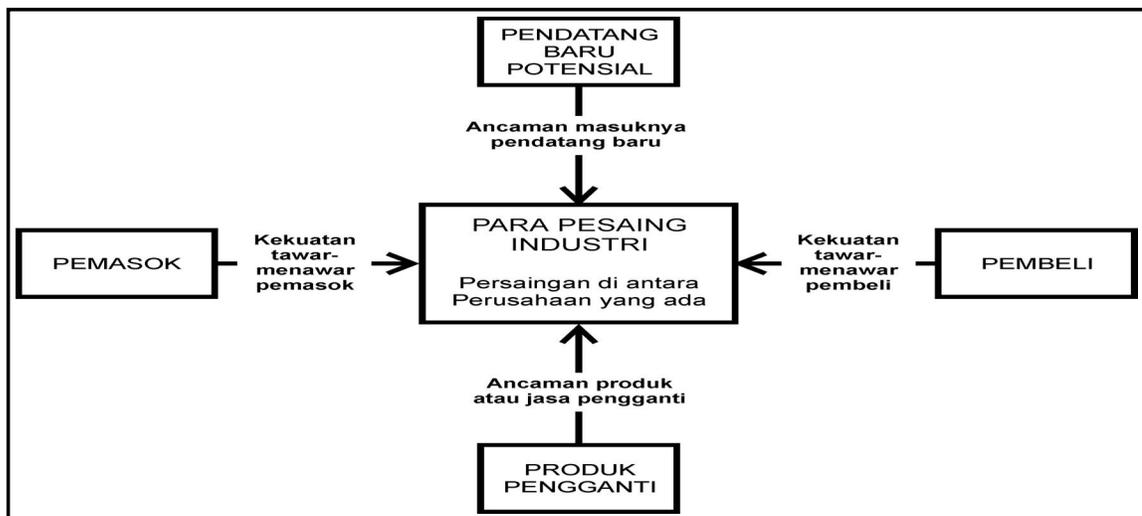
Menurut Karsidi (1999), klasifikasi pengrajin industri kecil dapat digolongkan menjadi:

- a. Buruh pengrajin adalah tenaga kerja yang dibayar oleh pemilik pekerjaan (dalam hal ini oleh pengrajin), baik sebagai buruh harian atau buruh mingguan.
- b. Pengrajin adalah mereka yang berusaha dalam industri kecil, baik sebagai pekerja sendiri maupun pengrajin yang dibantu oleh buruh.
- c. Pengrajin pengusaha (pedagang pengumpul) adalah pengrajin besar yang sudah berpengalaman dengan kecukupan modal tertentu bagi usahanya.

Teori Daya Saing

a. Competitive Advantage Michael

Kondisi persaingan menurut Porter seperti gambar di atas dipengaruhi oleh daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, ancaman pendatang baru, ancaman dari produk substitusi, dan persaingan dari industri sejenis.



b. Teori Diamond Porter

Menurut diamond Porter daya saing dipengaruhi oleh: (1) faktor input, faktor produksi seperti tenaga kerja, sarana dan prasarana, (2) Kondisi permintaan, yaitu sifat permintaan pasar awal bagi produk dan komitmen industri, (3) Industri pendukung dan industri berkait, yaitu wujud industri hulu dan industri berkaitan lainnya, dan (4) Strategi perusahaan dan pesaing, yaitu keadaan internal perusahaan, juga sifat dari persaingan domestik.

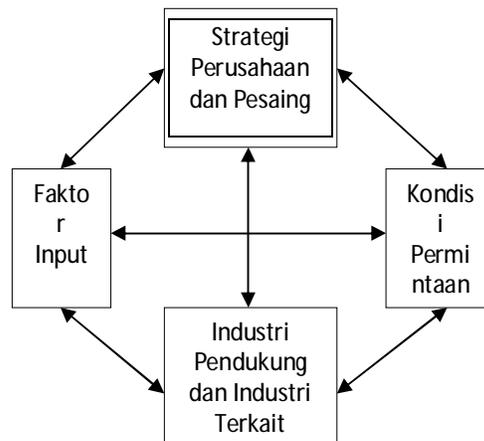
Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Moleong (2002), yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dengan mengambil lokasi di Desa Trangsan Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo.



Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2010), penentuan sampel penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik, sehingga cara yang digunakan adalah *Snowball sampling technique* (Bogdan and Biklen, 2003).

Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi langsung
- b. Wawancara mendalam

Focus Group Discussion

Validitas Data

Guna menjamin validitas data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diuji dengan, (1) triangulasi data (sumber) dan (2) triangulasi metode.

Analisis Data

Model analisis data menggunakan analisis interaktif dengan tiga komponen analisisnya yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan.

Pembahasan

Kondisi Pengrajin Mebel di Desa Trangsan

Kondisi pengrajin di Desa Trangsan sudah pernah mengalami masa pasang surut, dan ini telah memperkaya pengalaman para pengrajin dalam mengelola usahanya. Perubahan-perubahan kebijakan Pemerintah dalam tata niaga rotan ada yang menguntungkan pengrajin maupun yang merugikan sudah pernah dialami.

Pada tahun 90-an dan di awal tahun 2000-an kondisi pengrajin di Trangsan mengalami booming, yang ditandai dengan munculnya pengrajin-pengrajin baru dipicu oleh permintaan dari pasar internasional yang tinggi, juga perubahan kurs mata uang rupiah yang jatuh, menyebabkan semua produk yang menggunakan bahan baku lokal memiliki daya saing yang tinggi di pasar internasional.

Kondisi yang menggairahkan bagi industri mebel tersebut surut seiring dengan menguatnya nilai tukar mata uang rupiah, ditambah dengan peraturan dan kebijakan pemerintah yang menyebabkan meroketnya harga bahan baku rotan sehingga keberadaan rotan langka dan tak terjangkau.

Namun demikian, bagi pengrajin yang tangguh kondisi yang sulit tersebut menantang kreativitas para pengrajin. Kesulitan dan mahalanya rotan membuat para pengrajin menggunakan bahan-bahan baru, misal: mendong, eceng gondok, gedebog pisang dan lain-lain yang ada sepanjang tahun, dengan harga yang terjangkau.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masa surut industri mebel khususnya di Trangsan sempat merontokkan beberapa pengrajin. Namun bila diteliti lebih jauh pengrajin yang rontok adalah pengrajin yang tidak ulet dan tidak tahan banting. Pengrajin yang ulet malahan dapat berkreatasi menghasilkan mebel dengan bahan baku lain yang tidak kalah mutunya.

Pengrajin memiliki kelemahan-kelemahan antara lain akses pemasaran yang rendah, ketergantungan terhadap pihak lain yang sangat tinggi, akses pendanaan dari lembaga keuangan yang masih rendah, keterbatasan ragam desain produk, harga produk yang lebih tinggi dibandingkan harga produk pesaing.

Namun di samping itu terdapat banyak kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk meraih berbagai peluang. Kekuatan-kekuatan itu antara lain: pengalaman industri yang cukup lama sehingga telah terbiasa menghadapi dinamika usaha, tersedianya banyak potensi sumber daya manusia untuk mendukung industri tersebut. Kekuatan-kekuatan itu memang belum tergolong maksimal. Sehingga upaya peraihan peluang masih belum optimal. Berkaitan dengan itu, dapat dikatakan bahwa industri mebel di Trangsan sebenarnya mempunyai potensi yang besar untuk bisa dikembangkan.

Lingkup Pemberdayaan

Untuk keberhasilan pemberdayaan pengrajin, lingkup kegiatan pemberdayaan sesuai dengan 4 (empat) bina Sumadyo dan Mardikanto, di mana empat bina tersebut adalah bina manusia, bina lingkungan, bina usaha dan bina kelembagaan. Seperti terlihat selama penelitian berlangsung, bahwa untuk pemberdayaan pengrajin di Trangsan tidak akan memberikan dampak maksimal kalau hanya dilakukan sepotong-sepotong, namun harus dilakukan secara komprehensif. Termasuk dalam pemberdayaan yang komprehensif tersebut adalah adanya pemberdayaan sinergis dari aspek sumberdaya manusia, aspek usaha, lingkungan bisnis yang kondusif, serta adanya kelembagaan pemberdayaan yang menjamin kelangsungan pemberdayaan. Meski lingkup pemberdayaan adalah sinergisitas empat bina tersebut, namun yang perlu menjadi prioritas pertama adalah bina lembaga (membentuk kelembagaan bisnis), bina lingkungan, bina manusia, baru bina usahanya.

Model Pemberdayaan Pengrajin di Masa yang Akan Datang

Upaya Pemberdayaan yang pernah dilakukan, antara lain oleh GTZ, Disperindag dan Koperasi Kabupaten Sukoharjo, pemberdayaan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa upaya pemberdayaan yang pernah ada di Trangsan masih dilakukan secara parsial, bukan merupakan upaya pemberdayaan yang tergolong sistemik, sehingga dampaknya belum begitu menggembirakan. Ini tergambar pada belum mampunya pihak-pihak pengrajin ataupun buruh untuk menjadi berdaya. Dengan demikian, jelas bahwa akar dari kelemahan pemberdayaan yang selama ini ada adalah sistem pemberdayaan yang kurang diperhatikan secara komprehensif.

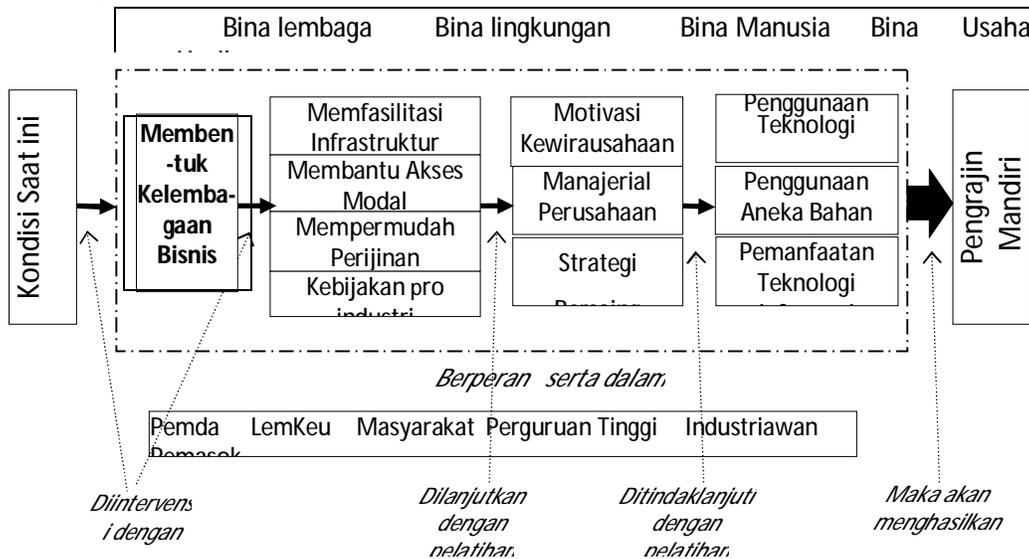
Terhadap pemberdayaan yang pernah ada kegiatannya sebagai proyek. Ada perbedaan yang mendasar antara pendekatan proyek dengan pendekatan program. Pada pendekatan proyek, sifat operasionalnya hanyalah menyelesaikan suatu kegiatan tertentu dengan waktu yang terbatas, tanpa memperhatikan dampak yang terjadi. Lain halnya dengan pendekatan program. Pada pendekatan program kegiatannya tidak parsial seperti pada proyek, namun bersifat komprehensif. Dalam program ada interkoneksi antar elemen, ada sinergisitas dalam operasionalnya, perlu dilakukan dengan simultan, dan ada pengukuran hasil antara sebelum dilakukan program dengan setelah dilakukan program. Dengan demikian, jelas bahwa melalui pendekatan program akan dilakukan evaluasi *before-after* kegiatan.

Guna melakukan pemberdayaan yang berdampak menguatkan kemampuan individual pengrajin serta memperkuat ikatan sosial para pengrajin, maka pendekatan program mutlak untuk dilakukan. Elemen pemerintahan daerah, elemen masyarakat, pengrajin, asosiasi, lembaga keuangan harus dikoordinasikan agar dapat mewujudkan sinergisitas. Menurut Freeman (1984) elemen-elemen itu disebut dengan *stakeholder*, yaitu, kelompok atau individu yang dapat

mempengaruhi atau dipengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu. Terkait dengan pengertian itu, ODA (1995) merinci lebih tegas peran dari masing-masing elemen *stake holder* ke dalam *stake holder* primer, sekunder, dan *stakeholder* kunci.

Memperhatikan realitas yang ada di Trangsas, dan juga teori *stakeholder* yang digagas Freeman dan ODA di atas, maka Trangsas memerlukan model pemberdayaan baru yang lebih bersifat komprehensif, solutif, berkesinambungan. Model inilah yang disebut dengan model sinergisitas. Pendekatannya tidak lagi parsial dan berbentuk proyek, melainkan lebih bersifat komprehensif, simultan dan berjangka panjang, yang identik dengan sebutan program.

Guna memperkuat pemberdayaan di Trangsas, teori *competitive advantage* dari Porter layak diperhatikan. Teori itu menyebutkan bahwa untuk peningkatan keberdayaan sebuah unit bisnis dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu: daya tawar pemasok dan daya tawar pembeli, serta adanya ancaman pendatang baru maupun ancaman barang pengganti. Di dalam industri yang sejenis juga melekat persaingan. Ini menunjukkan bahwa fundamen perusahaan memegang peranan penting, baik itu dalam hal posisinya dalam industri, maupun struktur industrinya itu sendiri. Yang jelas, agar bisa unggul dalam bersaing, maka memerlukan efisiensi dan kekhususan (karakter) produknya. Efisiensi dan kekhususan ini bisa dicapai jika pemerintah (baca: politisi dan birokrasi) mampu menciptakan konfigurasi industri dalam bentuk kluster yang didukung dengan pemberdayaan secara sistemik.



Model Pemberdayaan Pro Industri Berbasis Sinergisitas

Terkait dengan apa yang bisa dipetik dari teori yang diusung Porter itu, Pemerintah sebaiknya menyelenggarakan dengan konsisten sistem kluster. Karena dalam sistem kluster ini ada integrasi yang baik antar pemangku kepentingan. Di dalam sistem kluster ini pula teori yang dikembangkan oleh Mardikanto, berupa bina lingkungan, bina manusia, bina usaha, bisa diterapkan secara sinergis.

Sutrisno (2012) menjelaskan bahwa sistem kluster memiliki karakteristik penggabungan usaha sejenis dalam satu wilayah saling berdekatan dan saling berhubungan berkaitan menjadi hulu hilir. Ada banyak variabel yang perlu ada dalam setiap kluster, antara lain: dukungan pembiayaan, penguatan dalam bentuk pelatihan teknologi industri, teknologi informasi, pemasaran, pengelolaan bisnis dan sebagainya. Yang jelas, dalam kluster industri memerlukan strategi kunci berupa kesadaran akan perilaku pasar, kerjasama antar *stakeholder*, penguatan jejaring, deregulasi dan desentralisasi, serta penguatan institusi. Berdasarkan pemikiran Porter (1990), Mardikanto (2010c), dan Sutrisno (2012), dan realitas yang ada di Trangsas dapat disusun model pemberdayaan pro industri berbasis sinergisitas. Bila digambarkan, model pemberdayaan sinergisitas terlihat dalam gambar Model Pemberdayaan Pro Industri Berbasis Sinergisitas.

Berdasarkan pemikiran Porter (1990), Mardikanto (2010c), dan Sutrisno (2012), dan realitas yang ada di Trangsan dapat disusun model pemberdayaan pro industri berbasis sinergisitas. Bila digambarkan, model pemberdayaan sinergisitas terlihat dalam gambar: Model Pemberdayaan Pro Industri Berbasis Sinergisitas

Sistem Pemberdayaan

Mengacu pada Undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan (pemberdayaan), maka model pemberdayaan pengrajin mebel di Trangsan meliputi:

1. Kebijakan yang Pro Industri

Pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah maupun pusat, perlu mengkaji dengan seksama setiap kebijakan yang akan diberlakukan. Sehingga setiap keputusan kebijakannya benar-benar berdampak positif bagi semua pihak yang ada dalam industri itu. Tidak seperti kebijakan yang selama ini ada, yang menguntungkan bagi satu pihak tertentu tetapi merugikan pihak lain. Contohnya dalam kebijakan rotan yang telah disinggung di atas. Pada kebijakan tertentu industri diuntungkan, namun petani rotan dirugikan.

Lantas muncul kebijakan lagi yang dampaknya hanya membalik, yaitu petani diuntungkan namun industri dirugikan. Kebijakan seperti ini seharusnya tidak terulang kembali. Kebijakan-kebijakan yang ada seharusnya betul-betul mengkaji dengan seksama antara kepentingan pemasok, industri, konsumen, pemerintah, dan keberlangsungan usaha.

2. Ketenagaan (Pelaku Pemberdayaan)

Dalam rangka pemberdayaan diperlukan pelaku-pelaku pemberdayaan, Terkait dengan program pertama dan kedua yaitu: pembentukan kelembagaan bisnis, pengembangan infrastruktur, akses permodalan, dan mempermudah perijinan, maka peran semua elemen mutlak diperlukan. Dalam garis besarnya, peran utama pemberdayaan adalah pemerintah daerah. Tetapi peran itu tidak sendirian, pemerintah daerah harus berkolaborasi dengan para pelaku industri mebel (pengrajin dan pengusaha), dengan asosiasi industri, lembaga keuangan, dan masyarakat sekitar. Kolaborasi itu harus ditata sedemikian rupa hingga menjadi suatu sistem pemberdayaan yang betul-betul akan bisa memberdayakan.

3. Penyelenggaraan

a. Pendekatan

Ada banyak pendekatan dalam pemberdayaan. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang tepat dalam pemberdayaan bagi pengrajin yang memiliki kekhususan seperti di Trangsan. Parsons (1994), menyatakan ada 3 (tiga) pendekatan yaitu: mikro, mezzo, dan makro. Dalam pemberdayaan di Trangsan yang paling tepat adalah dengan pendekatan mezzo, di mana pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok pengrajin. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi, pendidikan dan pelatihan. Dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap pengrajin agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.

b. Strategi

Sejalan dengan pendapat Kartasasmita (1995), yang merumuskan ada 3 (tiga) strategi pokok dalam pemberdayaan, yaitu: 1). Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat (pengrajin). 2). Memperkuat potensi atau daya yang ada pada masyarakat, 3). Memberdayakan dalam arti melindungi dan membela kepentingan rakyat.

Dalam model pemberdayaan pro industri berbasis sinergisitas strategi pertama tercermin dalam pembentukan kelembagaan bisnis dan pengembangan infrastruktur, membantu akses permodalan, mempermudah perijinan, serta kebijakan yang pro industri. Sementara untuk memperkuat potensi atau daya yang ada pada masyarakat tercermin dalam bina manusia (pelatihan motivasi kewiraswastaan, manajerial perusahaan, serta strategi bersaing), juga bina usaha (penggunaan teknologi penggunaan aneka bahan, pemanfaatan teknologi informasi). Adapun memberdayakan dalam arti melindungi dan membela kepentingan rakyat, dilakukan oleh kelembagaan pemberdayaan yang menjamin keberlanjutan dari pemberdayaan tersebut.

c. Metode

Metode pemberdayaan yang efektif diperlukan untuk dapat tercapainya tujuan pemberdayaan, Namun demikian tidak ada satupun metode pemberdayaan yang dapat diterapkan pada semua subyek pemberdayaan. Dari berbagai metode pemberdayaan partisipatif yang paling tepat adalah

PRA (*participatory rural appraisal*). PRA dilakukan dengan lebih banyak melibatkan stakeholder (semua pemangku kepentingan) dengan fasilitasi orang luar yang lebih berfungsi sebagai nara sumber atau fasilitator.

d. Materi

Materi pelatihan sebagaimana dalam model pemberdayaan di atas adalah:

a). Motivasi Kewirausahaan

Setiap orang mempunyai potensi dasar yang berfungsi untuk mengarahkan perilakunya dalam mencapai tujuannya. Potensi dasar inilah yang dikenal dengan istilah motif atau motivasi. Terkait dunia kerja atau dunia wirausaha, tentu terdapat banyak keinginan, seperti: pendapatan yang akan diterima, kelangsungan kerja, peluang untuk berprestasi, hubungan sosial dalam kerja, arti dari pekerjaannya itu sendiri, peluang untuk berkembang, kondisi kerja yang nyaman, sesuai kompetensinya, bersifat rasional, dan sebagainya.

b). Manajerial Perusahaan

Pelatihan manajerial perusahaan dalam garis besarnya difokuskan pada fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penerapan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Keempat fungsi itu diterapkan pada empat bidang utama dalam perusahaan, yaitu: sumber daya manusia, operasional/produksi, pemasaran, keuangan. Dengan demikian, peserta pelatihan dapat menggambarkan secara utuh bahwa dengan dukungan sumber daya manusia yang terlatih dan jumlahnya cukup, akan mampu mendukung operasional perusahaan yang lebih efektif dan efisien.

c). Strategi Bersaing

Wawancara dengan para perajin mengindikasikan bahwa selain adanya kekurang pahaman mereka dengan hal-hal yang bersifat manajerial, ada kelemahan lain yang tidak kalah penting yaitu tentang bagaimana mereka menghadapi persaingan. Kesulitan itu wajar saja terjadi, karena mengidentifikasi siapa pesaing mereka saja kesulitan. Pesaing selama ini hanya diidentifikasi sebagai perusahaan sejenis di tempat lain. Dengan identifikasi seperti ini, tentu akan banyak peluang yang menjadi tidak tergarap. Berdasarkan pada hal itu maka pelatihan tentang strategi bersaing juga harus dilakukan.

Sarana/prasarana

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelembagaan pemberdayaan swasta, dan kelembagaan swadaya menyediakan sarana dan prasarana penyuluhan (pemberdayaan). Dalam model pemberdayaan sarana/prasarana ini diwujudkan dalam program kedua, yaitu: memfasilitasi infrastruktur, membantu akses permodalan, dan mempermudah perijinan.

a). Memfasilitasi Infrastruktur

Selain pembentukan kelembagaan bisnis milik pengrajin, Pemerintah Daerah juga perlu memfasilitasi infrastruktur yang melancarkan keluar masuknya arus barang menuju maupun ke luar Transgan. Infrastruktur ini dapat berupa akses jalan yang lancar, pasar bahan baku maupun barang produksi, serta beberapa akses telekomunikasi dan informasi yang memadai. Salah satu yang perlu segera diwujudkan adalah hasil rekomendasi dari penelitian UKSW Salatiga, yaitu perlunya pembentukan terminal rotan. Bukan hanya berhenti ada pengadaan terminal rotan, yang terpenting justru adanya kepastian dan kelancaran arus pasokan rotan dari sumbernya.

b). Membantu Akses Permodalan

Akses permodalan juga harus segera mendapat perhatian pemerintah, agar masing-masing pengrajin tidak mengalami kesulitan untuk mengaksesnya. Sejauh ini beberapa perbankan sudah membuka diri, hanya saja persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan menjadi kendala tersendiri bagi pengrajin. Salah satu hambatan utama adalah profil dan kewajiban agunan. Pemerintah memang telah memunculkan berbagai program, seperti KUR.

c). Mempermudah Perijinan

Salah satu yang perlu mendapat perhatian seksama adalah hal perijinan usaha. Para pengrajin umumnya tidak memiliki legalitas usaha yang meliputi: SIUP, SITU, NPWP, TDI, dan sebagainya. Tidak adanya legalitas usaha ini yang menyebabkan para pengrajin kesulitan dalam mengakses modal di institusi perbankan maupun institusi pembiayaan lainnya.

Sumber Pembiayaan Pemberdayaan

Biaya terkait dengan program pemberdayaan tentu saja tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu perlu diidentifikasi sumber-sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk menopang pelaksanaan program pemberdayaan hingga mencapai tujuannya dengan sukses.

Terdapat beberapa sumber dana, namun secara garis besar dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu sumber dana dari pemerintah, dan sumber dana berasal dari non pemerintah. Pemberdayaan di Trangsan dapat dibiayai dari kedua sumber tersebut. Tentu saja ada kelebihan dan kelemahannya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam menyalurkan pembiayaannya berpedoman pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007. Sumber pembiayaan pemberdayaan lain yang bisa dimanfaatkan adalah dana *corporate social responsibility* (CSR). Dana CSR ini bersumber dari perusahaan-perusahaan dengan badan hukum Perseroan Terbatas. Berdasar UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan berdasar UU No.25 tahun 2007 tentang Pasar Modal, telah diwajibkan bagi perusahaan-perusahaan untuk menyisihkan sebagian laba dalam bentuk dana CSR.

Ke depan diperlukan industri jasa perusahaan (pemberdayaan) yang berfungsi menjembatani antara pengrajin dengan perusahaan-perusahaan yang atas kewajiban undang-undang harus mengeluarkan dana namun tidak jelas kemana dana tersebut untuk disalurkan.

Pembinaan dan Pengawasan

Keberhasilan pemberdayaan sangat tergantung pada pembinaan dan pengawasan, untuk itu perlu dilakukan pengukuran terhadap keberhasilan pemberdayaan. Guna mengukur keberhasilan itu, maka yang perlu diukur adalah dengan membandingkan antara sebelum dan sesudah program pemberdayaan. Agar ukuran itu bisa menunjukkan validitasnya, maka desain alat ukur ini menjadi sangat penting. Selain hal validitas, perihal kemudahan implementasi dan konsistensi juga harus diperhatikan. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, maka pengukuran perkembangan sebaiknya dilakukan secara periodik dalam kurun waktu pelaksanaan program.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- a. Pengrajin memiliki kelemahan-kelemahan tetapi juga memiliki kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk meraih berbagai peluang. Berdasarkan kekuatan dan kelemahannya menunjukkan bahwa industri mebel di Trangsan mempunyai potensi yang besar untuk bisa dikembangkan.
- b. Guna mengembangkan industri mebel di Trangsan, perlu dilakukan pemberdayaan dengan pola empat bina, yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Keempatnya harus dilakukan secara simultan dan terintegrasi, agar dampak pemberdayaannya bisa lebih nyata.
- c. Pemberdayaan yang dilakukan oleh banyak pihak ternyata bermanfaat memberikan wawasan yang cukup berarti bagi industri mebel Trangsan. Hanya saja masih menyisakan berbagai kendala, yaitu pemberdayaan yang ada dilakukan secara parsial, tidak berupa kebijakan yang bersifat sistemik. Dengan demikian, akar dari kelemahan pemberdayaan yang selama ini ada adalah sistem pemberdayaan yang kurang komprehensif.
- d. Guna membangun sistem pemberdayaan yang sesuai dengan karakter industri mebel di Trangsan harus melibatkan semua elemen stakeholder, seperti pemda (termasuk politisi dan birokrasi), lembaga keuangan, masyarakat sekitar, perguruan tinggi, industriawan, pemasok, dan stakeholder lainnya. Model ini disebut dengan model pemberdayaan pro industri berbasis sinergitas, karena mensinergikan semua elemen yang ada untuk melakukan pemberdayaan. Akhir dari program pemberdayaan adalah terciptanya pengrajin yang mandiri.

Implikasi Penelitian

- a. Implikasi Teoritis

Berdasarkan simpulan bahwa program pemberdayaan yang selama ini ada di Trangsan belum semua pengrajin yang ada mampu terberdayakan oleh program pemberdayaan yang pernah ada. maka perlu didesain ulang model pemberdayaan yang sesuai untuk industri mebel Trangsan.

Model yang cocok adalah model yang berbasis sinergisitas. Artinya model tersebut perlu mengikutsertakan seluruh elemen *stakeholder* untuk melakukan kegiatan pemberdayaan yang sistemik dengan pendekatan program. Pasca implementasi model berbasis sinergisitas ini akan bisa ditindak lanjuti dengan berbagai penelitian yang menguji keefektifan maupun keefisienannya, baik dalam menilai keberhasilan program secara utuh, maupun penelitian pada setiap program kegiatan.

b. Implikasi Praktis

Penerapan model pemberdayaan berbasis sinergisitas ini memerlukan konsistensi dalam evaluasi setiap kegiatan, maupun evaluasi atas hasil program secara paripurna. Oleh karena itu, rangkaian kegiatan maupun skedul pelaksanaannya harus terdokumentasi dengan baik. Susunan mulai dari perencanaan pengorganisasian, implementasi, dan proses evaluasi harus termonitor dan terdokumentasi dengan baik. Tujuannya adalah, setiap kegiatan maupun dari hasil monitor yang terdokumentasi akan bisa digunakan untuk data pengambilan keputusan, untuk proses evaluasi, serta kemungkinan untuk perbaikan model ataupun upaya replikasi.

Saran

1. Pemerintah

Pengrajin di Trangsan merasakan kendala yang berarti adalah berada pada wilayah eksogenal, yang itu hanya bisa diatasi dengan intervensi pemerintah, untuk itu kepada pemerintah disarankan untuk memberikan intervensi yang mampu melancarkan dan menguatkan industri mebel Trangsan. Intervensi bisa berupa penetapan kebijakan yang pro industri, seperti pemberian fasilitas untuk melancarkan arus bahan baku, memberikan kemudahan perijinan, mendukung terciptanya lembaga bisnis yang mampu mewadahi para pengrajin, serta mempermudah akses permodalan.

2. Pengrajin

Pengrajin sebaiknya melakukan pengasahan inovasi dan kreativitas secara mandiri tanpa harus menunggu pihak lain untuk memotivasinya. Karena, semua yang dimulai dari basis internal akan menghasilkan daya kemampuan yang lebih baik.

3. Masyarakat Pengrajin

Diperlukan kekompakan antar pengrajin. Kekompakan yang terbentuk itu perlu diwadahi dalam suatu bentuk lembaga bisnis, sehingga posisi tawar pengrajin akan menjadi kuat menghadapi para pesaing.

4. Peneliti

Pemberdayaan yang ada di Trangsan masih bisa dikategorikan sebagai uji coba model. Ini terlihat dari sifatnya yang tambal sulam, dan tidak diikuti dengan proses evaluasi dengan seksama. Berdasar hal itu, maka para peneliti ke depan hendaknya melakukan penelitian yang lebih komprehensif dengan cara melakukan komparasi antar model yang ada, lalu mencoba menemukan model yang terbaik yang bisa direplikasi di tempat lain.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, (2010), *Sukoharjo Dalam Angka, 2009*.
- Baten, T.R., (1969), *Pembangunan Masyarakat Desa*, disadur oleh Suryadi, Alumni, Bandung.
- Bogdan, R. C. and Biklen, S. K. (2003). *Qualitative Research for Education: An introduction to Theories and Methods (4th ed.)*. New York.
- Cho and Moon, (2003), *From Adam Smith To Michael Porter: Evolusi Teori Daya Saing*. (Terjemahan Erly Suandy) Edisi Pertama, PT. Salemba Empat, Jakarta.
- Comb, P. and Ahmed, M.,(1980), *Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Non Formal*, Rajawali Press, Jakarta.
- Davies, M., ((1991), *The Sociology of Social Work*, Routledge, London.
- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GTZ) red (*Regional Economic Development*), Bank Indonesia Semarang (2007), *Pengembangan Klaster Mebel Rotan di Trangsan Kec. Gatak Kab. Sukoharjo Jawa Tengah*, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/04CEBD5D-9A13-4E48-973E-3FB4C5C17F6A/10407/Boks3.pdf>.

- [Freeman, R. E.](#), (1984). *Strategic Management: A stakeholder approach*. Boston: Pitman. [ISBN 0-273-01913-9](#)
- Friedmann, J., (1992), *Empowerment: The Politics and Alternative Development*, Blacktewell Publishers, Cambridge, Massachusetts, 02142 USA.
- Hardiman and Midgley, (1982) *The Social Dimension of Development*, New York: John Wiley and Sons Ld.
- Karsidi, R., 1999. *Kajian Keberhasilan Transformasi Pekerjaan dari Petani ke Pengrajin Industri Kecil* (Disertasi Doktor Institut Pertanian Bogor), tak diterbitkan.
- , 2005, *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta, Jawa Tengah)*, Makalah dalam Seminar Nasional Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana IPB, 21 September.
- , *Mobilitas Sosial Petani di Sentra Industri Kecil, Kasus di Surakarta*, Artikel website, diakses 10 Nopember 2010
- Kartasasmita, G., (1995), *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- , 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta.
- Kotler, P., (2003), *Rethinking Marketing Sustainable Marketing Enterprise di Asia*, Jakarta: Pearson Education Asia Pte.Ltd. dan PT. Prehallindo.
- Lofland and Lyn, (1994), *Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*, Wadsworth Publishing; 3 edition.
- Long, N., (1977), *An Introduction to The Sociology of Rural Development*, Westview Press, Boulder, Colorado.
- Mardikanto, T. (2010a), *Komunikasi Pembangunan*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- , (2010b), *Metoda Penelitian dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat*, Program Studi Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat, Program Pasca Sarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- , (2010c), *Konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat*, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS, Surakarta.
- [Miles](#) and Huberman (1994) *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Newbury Park, CA: Sage.
- [Moleong](#), L.J.,(2002), *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Overseas Development Administration (ODA), 1995, *Guidance Note On How To Do Stakeholder Analysis Of Aid Projects and Programmes*, Social Development Department, July 1995.
- Phillips and Freeman (2003). *Stakeholder Theory and Organizational Ethics*. Berrett-Koehler Publishers. [ISBN 1-57675-268-2](#)
- Porter, M.E., (1990a), The competitive advantage of Nations. *Harvard Business Review*, No.2, March/April.
- (1990b), *The Competitive Advantage of Nations*, The Macmillan Press Ltd, London and Basingstoke.
- Soetomo, (2010), *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soetrisno, N, (2012), *Pemetaan dan Pendekatan Klaster Komunitas Unggulan Daerah dan Komoditas Utama Penyumbang Inflasi*, Pengantar Diskusi FGD - Bank Indonesia 15 Maret, Tidak dipublikasikan
- , (2002), *Strategi Penguatan UKM Melalui Pendekatan Klaster Bisnis: Konsep, Pengalaman Emperis dan Harapan*. Penerbit Lutfansah Mediatama, Surabaya.
- Sugiyono, (2010), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sumodiningrat, G., (1994), "Tantangan dan Peluang Pengembangan Usaha Kecil", *Jurnal Tahunan CIDES*, no.1.
- Sutopo, H.B. (2002), *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Sebelas Maret Universitas Press, Surakarta.
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2008, tentang Usaha Kecil di Indonesia, Jakarta.
- Winarno, B., (2003), *Komparasi Organisasi Pedesaan dalam Pembangunan*, Media Presindo, Yogyakarta